

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan terbesar di Indonesia yang didirikan pada 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan 31 Januari 1926 M.¹ Organisasi ini dirintis oleh para kiai yang berpaham *Ahlussunnah wal Jamaah*, sebagai wadah usaha mempersatukan diri serta menyatukan langkah dalam tugas memelihara, melestarikan ajaran islam serta berkhidmat pada kepentingan bangsa dan negara. Organisasi ini dalam gerak dan eksistensinya memainkan peran begitu penting bagi kehidupan bangsa. Sebagai organisasi yang besar tentunya dapat dipastikan beban tanggung jawab yang dipikul oleh NU ini sangatlah besar pula.² Menjadi sebuah konsekuensi ketika arah gerak dan sikap kebangsaan NU menjadi titik penentu arah bangsa Indonesia. Sikap politik tersebut diambil bukan sebatas untuk melindungi para pemimpin beserta rakyatnya dari berbagai macam demoralisasi politik, tetapi lebih dari itu keputusan diambil untuk menjaga keutuhan negara yang masih berproses dalam demokrasi.³

Selain beban kebangsaan yang tanggung jawabnya begitu besar, namun NU juga dihadapkan dengan berbagai macam dinamika politik yang menuntut NU untuk dapat melakukan penyesuaian agar eksistensi dari organisasi ini dapat tetap bertahan. Proses penyesuaian tersebut telah banyak ditulis oleh para sejarawan yang menggambarkan proses dinamisasi tersebut dilakukan, baik sejak awal berdirinya hingga berbagai perkembangannya. Meskipun para ulama tradisional mendasarkan tradisinya pada pemikiran konservatisme⁴ yang berkarakter kaku dan sulit beradaptasi, namun

¹ Kang Young Soon, *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitan Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: UI Press, 2007), hal.77.

² Nur Khalik Ridwan, *NU dan Bangsa 1914-2010*. (Yogyakarta: Arruz Media, 2021), hal.5.

³ *Ibid*.

⁴ Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama*. (Jakarta: LP3ES, 2004), hal. xxiv.

dengan wadah yang tepat seperti NU menjadikan perlunya NU untuk dimunculkan sebagai wadah pergerakan bagi kelompok masyarakat muslim tradisional dalam usaha untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi umat Islam di Indonesia. Dalam pendirian dan perjalanannya memang tidaklah lepas dari sebab tekanan penjajahan kolonial, tekanan negara yang represif, serta arus modernisasi dan globalisasi yang memaksa NU berani untuk mengambil arah perubahan kearah pembaharuan namun di sisi lain juga memiliki tantangan serius bagi NU baik dalam aspek ekonomi, kebudayaan serta aspek keagamaan. Dalam hal ini, para ulama berkepentingan untuk berupaya melakukan ijtihad politik dengan melakukan interpretasi atas ajaran agama sebagai sebuah solusi atas ikhtiar membangun kondisi yang maslahat bagi umat yang tujuan akhirnya adalah menjadi sebuah gerakan kemerdekaan bagi umat Islam di Indonesia secara luas.⁵

Dalam perjalanannya, ijtihad politik NU diwarnai dengan berbagai macam dinamika, mulai dari bergabung bersama Masyumi dalam menyalurkan aspirasi politiknya, setelah itu NU berdiri sendiri sebagai partai politik yang terbilang sukses dalam kontestasi pemilu pertama kali pemerintah Indonesia hingga masuk dalam 4 besar meskipun saat itu masih sebagai partai yang baru.⁶ Perjalanan politik NU tidak selalu mulus karena NU sungguh-sungguh terjun di arena politik hanya sejak pemilu tahun 1955 sampai pemilu tahun 1971 NU sukses mendapatkan dukungan suara cukup memuaskan. Masalah itu dimulai dari 1973 saat NU mengalami fase awal perpecahan, sebab di era orde baru semua partai harus fusi termasuk NU harus fusi dalam satu partai ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai tersebut tidak jauh berbeda seperti Masyumi dulu, konflik antar faksi dalam tubuh PPP terus menjadi-jadi dan tak kunjung selesai. Kasus yang terjadi di PPP persis seperti yang terjadi di Masyumi, yaitu NU selalu dimanfaatkan suaranya pada pemilu lalu setelahnya ditinggal,

⁵ Muhammad Masyhuri, "NU dan Paradigma Teologi Politik Pembebasan: Refleksi Historis Pasca Khittah," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, 2 (Lumajang:2016) hal. 159.

⁶ Kang Young Soon, *Op.cit.*, hal.112.

hal itu dibuktikan dengan tidak diberinya kesempatan jabatan ketua umum dipegang dari tokoh kalangan NU. Hal itu memicu disikap NU pada tahun 1984 yaitu ketika NU melaksanakan muktamar ke-27 di Situbondo. NU berhasil memformulasikan haluan perjuangan NU yang sudah ada lama sebelumnya ke dalam formulasi baru yang dikenal sebagai “Khittah NU”. Sebagai formulasi yang berkembang menjadi landasan “Khittah NU 1926” yaitu sebuah formulasi yang menjadikan NU menjaga jarak dari arena politik praktis kemudian kembali menjadi sebuah organisasi sosial keagamaan yang fokus gerakannya pada sosial kemasyarakatan dan keagamaan demi kemashlahatan umat.⁷

Nampaknya dari perjalanan ijtihad politik tersebut masih menyisakan residu-residu politik di dalam internal organisasi NU, oleh karena untuk membendung aspirasi politik warga NU dibentuklah wadah partai politik yang di beri nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menjadi kendaraan dalam mengakomodir aspirasi warga NU, meskipun PKB dilahirkan dan dideklarasikan langsung oleh struktural PBNU saat itu, akan tetapi tidak semua kiai punya satu komitmen atau pandangan yang sama tentang PKB adalah partainya warga NU yang berakibat pada wajibnya warga NU memilih PKB.⁸ Dengan dinamika internal tersebut membawa dampak pada kelincahan NU dalam menghadapi setiap kondisi perubahan politik yang terjadi berdampak kepada NU dipandang sebagai organisasi sosial keagamaan yang kompromistis dan akomodatif, dengan kelebihan tersebut proses demokratisasi pada kalangan religius lebih memungkinkan hadir ketimbang oleh kelembagaan politik formal oleh karena itu NU berperan penting terhadap pendidikan politik di masyarakat yang memang tidaklah lepas dari yang namanya dinamika politik dalam pola hubungannya bersama pemerintah Indonesia.⁹

⁷ Nur Khalik Ridwan, *Op.cit.*, hal.265.

⁸ Titik Triwulan Tutik dan Jonaedi Efendi, *Membaca Peta Politik Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), hal.73-74.

⁹ Asep Saeful Muhtadi, *Op.cit.*, hal. 265-267.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik dengan wacana dan dinamika hubungan politik yang dibangun NU dengan Pemerintah Indonesia, terdapat beberapa pertanyaan yang mesti dikembangkan dalam pembahasan terkait hal tersebut, antara lain bagaimana dinamika hubungan politik antara NU dan Pemerintah Indonesia dari tahun 2004-2022 dan bagaimana wacana yang dibangun dalam proses hubungan politik NU dengan Pemerintah Indonesia. Berdasarkan pertanyaan dan permasalahan tersebut, kajian ini berupaya untuk melihat dinamika hubungan politik NU dan pemerintah Indonesia (2004-2022). Penelitian ini semata-mata adalah bentuk refleksi sikap NU atas dinamika perpolitikan tersebut yang dapat dikategorikan sebagai dimensi yang sesuai dengan tujuan sosial keagamaan, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip yang menciptakan kemashlahatan dalam konteks agama Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah penulis paparkan di atas, penulis mencoba memberikan titik fokus masalah yang timbul kemudian penulis jadikan sebagai rumusan masalah yang nanti menjadi salah satu kunci dalam penelitian yang akan dilakukan penulis antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika hubungan politik antara NU dan Pemerintah Indonesia (2004-2022)?
2. Bagaimana wacana politik yang dibangun oleh NU dalam proses dinamika hubungan politiknya dengan Pemerintah Indonesia (2004-2022)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dan manfaat proposal penelitian ini didesain untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dinamika hubungan politik antara NU dan Pemerintah Indonesia (2004-2022);

2. Untuk mengetahui wacana politik yang dibangun oleh NU dalam proses dinamika hubungan politiknya dengan Pemerintah Indonesia (2004-2022).

D. Kerangka Pemikiran

1. Teori Civil Society (Hegel)

Hegel berpandangan bahwa *civil society* dengan negara merupakan dua entitas yang berlawanan serta berbeda, namun keduanya dapat dipadukan dalam sebuah formulasi pemikiran politik baru, yaitu *civil society* dapat berintegrasi ke dalam negara sebagai bagian yang harus menyelaraskan tindakannya terhadap kepentingan negara. Hegel menformulasikan konsep *civil society* dengan memposisikan negara sebagai medium pemenuhan segala kebutuhan nilai baik dan memposisikan *civil society* sebagai elemen politik yang dinaungi supremasi hukum.¹⁰

NU merupakan basis *civil society* yang begitu besar di Indonesia, sehingga NU sangat diperhitungkan keberpihakannya oleh negara. Keputusan khittah NU yang salah satunya berisikan pengakuan asas tunggal pancasila merupakan bukti integrasi konkrit dari NU sebagai *civil society* kepada negara yang saat itu berusaha mengontrol setiap basis *civil society* yang ada di Indonesia. Dari hal tersebut penulis berpandangan bahwa teori *civil society* dari Hegel begitu relevan dalam menganalisa dinamika hubungan politik NU dengan pemerintah Indonesia (2004-2022).

2. Teori Identitas Nasional (Francis Fukuyama)

Identitas nasional merupakan pandangan yang dapat dibangun dengan berdasarkan nilai-nilai politik demokratis dalam pengalaman umum yang menyediakan jaringan yang dapat mengikat beragam identitas komunitas sehingga dapat berkembang. Perasaan nasional yang inklusif yang mengikat

¹⁰ Masroer dan Lalu Darmawan, "Wacana *Civil Society* (Masyarakat Madani) di Indonesia," *Sosiologi Reflektif*, Vol . 10, No. 2, (Yogyakarta:2016) hal. 40.

keragaman menjadi simpul semacam itu begitu penting untuk mempertahankan tatanan politik modern yang berhasil.¹¹

Konsep identitas nasional telah lama NU gaungkan sebagai wacana politik dengan nama politik kebangsaan.¹² Konsep tersebut merupakan sebuah jalan bagi organisasi NU dengan membuat simpul terhadap ratusan perbedaan di negeri ini menjadi segenap semangat kebangsaan. NU bersama komponen bangsa lainnya bertekad mewujudkan pembangunan nasional.¹³ Para ulama NU mempunyai ideologi inklusif keislaman-kebangsaan yang menjadikan semua orang dari berbagai identitas agama, suku, ras dan etniknya tertarik ikut NU membangun bangsa bersama-sama dan hal itulah yang menjadi modal serta kekuatan bagi NU dalam mewujudkan persatuan nasional.¹⁴

E. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian tentang dinamika hubungan politik Nahdlatul Ulama dengan Pemerintah Indonesia ini penulis melakukan kajian pustaka sebagai argumentasi dalam upaya memperkuat analisa dalam penelitian ini. Serta pengumpulan beberapa arsip berupa catatan organisasi maupun rilis berita yang menggambarkan aktifitas yang dilakukan organisasi Nahdlatul Ulama.

Adapun tinjauan pustaka yang akan menjadi rujukan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rakhman, Akhmad Syaekhu. 2021. *Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah: "Dinamika Perkembangan Politik Nahdlatul Ulama Pasca Khittah Tahun 1984-1999"*. Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia. Vol. 1, no. 1, Februari 2021. Pada jurnal ini membahas tentang latar belakang lahirnya NU, perkembangan NU pasca Khittah dan peran NU dalam demokrasi dan reformasi di Indonesia.

¹¹ Francis Fukuyama, *Identitas: Tuntutan atas Martabat dan Politik Kebencian*, Terj. Wisnu Prasetya Utama. (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2018), hal. 149.

¹² Nur Khalik Ridwan, *Op.cit.*, hal.477.

¹³ Ahmad Baso, *Ngaji Khittah NU untuk Pemula*, (Jakarta: Yayasan Garuda Bumandhala, 2022), hal.88.

¹⁴ Ahmad Baso, *Op.cit.*, hal.95.

Perbedaan peneliti dengan penelitian Rakhman adalah bahasan peneliti pada BAB III dan IV mencakup dinamika hubungan politik dan wacana politik nasional yang digagas oleh NU, sedangkan pada penelitian Rakhman membahas temuan dan analisisnya yang terfokus pada dinamika politik NU pasca khittah NU era kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid.

2. Man, L Yovenska. 2018. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam: "Urgensi Nahdlatul Ulama dalam Pemerintahan Indonesia"*. IAIN Bengkulu, Indonesia. Vol. 3, no. 2 (2018). Jurnal ini memberikan informasi tentang bagaimana peran NU dalam pemerintahan Indonesia dari berbagai bidang kontribusi. Perbedaan peneliti dengan penelitian Yovenska adalah bahasan peneliti terkait dinamika hubungan politik antara NU dengan pemerintah Indonesia berdasarkan periode jabatan ketua umum PBNU yang mana akan peneliti lakukan pada BAB III sedangkan pada penelitian Yovenska hanya fokus membahas dan mengungkap peran penting NU secara meluas di berbagai bidang terhadap jalannya roda pemerintah Indonesia.
3. Nuzula, Nur. 2016. *Skripsi: Politik Elite Nahdlatul Ulama (NU): Pemihakan Dalam Pemilihan Presiden (PILPRES) Tahun 2014*. Pada karya tulis ilmiah ini memberikan informasi tentang keberpihakan elite politik NU dalam ajang Pilpres tahun 2014 sebagai upaya mempertahankan eksistensi organisasi, meskipun NU tidak berpolitik praktis. Perbedaan peneliti dengan penelitian Nur Nuzula adalah rentang tahun yang diambil peneliti adalah 2004-2022 sejak penyelenggaraan pemilihan presiden secara langsung sampai saat ini sedangkan pada penelitian Nur Nuzula membahas temuan dan analisisnya yang terfokus pada keberpihakan elite NU hanya pada saat Pilpres tahun 2014.
4. Muhammad, Firdaus. 2015. *Kalam Jurnal studi Agama dan Pemikiran Islam: Dinamika Pemikiran dan Gerakan Politik*

Nahdlatul Ulama. IAIN Raden Intan Lampung, Indonesia. Vol. 9, no. 1, Juni 2015. Jurnal ini memberikan informasi tentang transformasi pemikiran politik kaum NU dalam politik keagamaan dan politik budaya sebagai warna gerakan politik NU.

Perbedaan peneliti dengan penelitian Muhammad Firdaus adalah bahasan peneliti membahas dinamika hubungan politik NU dengan Pemerintah Indonesia yang mana akan peneliti lakukan pada BAB III serta analisis wacana politik dalam dinamika hubungan politiknya pada BAB IV sedangkan pada penelitian Muhammad Firdaus terfokus pada pokok proses transformasi pemikiran dan gerakan politik dalam organisasi NU.

F. Metode penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan sejarah sebagai pendekatannya dan menggunakan ilmu bantu ilmu politik, jika dilihat dari sisi fokus, rumusan masalah serta tujuannya. Menurut Arikunto metode penelitian adalah “Cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.”,¹⁵ sedangkan Alwasilah berpendapat bahwa, “metode penelitian merupakan alat atau cara untuk menjawab pertanyaan penelitian”.¹⁶ Dengan demikian metode penelitian memiliki fungsi sebagai cara dan alat yang digunakan oleh peneliti untuk menguraikan jawaban terhadap serangkaian pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan langkah dengan metode deskriptif, studi literatur, Library Research untuk digunakan sebagai cara dan alat dalam menjawab rumusan masalah.

1. Metode Deskriptif

Metode Deskriptif Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif serta mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, karena pendekatan

¹⁵ Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hal. 203

¹⁶ A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2009), hal. 149

yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung terhadap penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang terjadi berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.¹⁸ Serta laporan dari deskriptif akan menyertai berupa kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian pada laporan tersebut.¹⁹

2. Studi Literatur

Teknik penelitian berikutnya yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah studi literatur, yaitu dengan cara meneliti dan memahami buku-buku, dokumen atau sumber tertulis lainnya yang relevan dan mendukung segala aktivitas organisasi Nahdlatul Ulama. Ada perbedaan dalam kategori dokumen dan *record* yaitu sebagai berikut: *Records* adalah segala catatan tertulis yang telah disiapkan seseorang atau lembaga untuk pembuktian sebuah peristiwa atau menyajikan perhitungan, sedangkan dokumen adalah barang yang tertulis atau terfilmkan selain *records* yang telah disiapkan khusus atas permintaan peneliti. Peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aktivitas organisasi Nahdlatul Ulama.²⁰

Peneliti juga akan mengumpulkan dokumentasi yaitu berupa barang-barang tertulis.²¹ Adapun macam-macam dokumen sebagai sumber literatur seperti jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, buku yang relevan, hasil-hasil

¹⁷ Arikunto.*Op.cit.*, hal. 151.

¹⁸ Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). hal 14.

¹⁹ Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 6.

²⁰ A. Chaedar Alwasilah.,*Op.cit.*, hal. 155.

²¹ Arikunto.*Op.cit.*, hal. 201.

seminar, artikel ilmiah yang belum dipublikasi, narasumber, suat-surat keputusan dan sebagainya.²²

3. Library Research

Peneliti juga melakukan teknik library research atau penelitian kepustakaan. penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menjadikan data-data kepustakaan sebagai teori untuk dikaji dan ditelaah dalam memperoleh hipotesa atau konsepsi untuk mendapatkan hasil yang objektif. Dengan jenis ini informasi dapat diambil secara lengkap untuk menentukan tindakan ilmiah dalam penelitian sebagai instrumen penelitian memenuhi standar penunjang penelitian.²³

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai material yang terdapat diruangan perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lain.²⁴

Dengan hal tersebut, dalam penyusunan skripsi ini peneliti menentukan topik yang akan dibahas yang kemudian dilanjutkan dengan mencari data-data yang relevan dan mendukung terhadap topik yang dibahas. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap sumber data yang diperoleh untuk selanjutnya mendapatkan fakta tentang kajian yang akan dibahas. Setelah terkumpul maka data disusun secara sistematis dan terstruktur.

²² Sukardi. *Op.cit.*, hal. 34.

²³ Subagyo, A. 1999. *Studi Kelayakan: Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999)., hal. 109.

²⁴ Mardalis. *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999). hal.28

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I berisi Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II membahas tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama dan setiap subab dalam bab ini akan membahas sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, Biografi Muassis atau Pendiri Nahdlatul Ulama kemudian disubab berikutnya membahas kronologi perjalanan politik Nahdlatul Ulama sebelum Khittah dan sesudah Khittah NU, bab ini sebagai pengantar dari sejarah perjalanan Nahdlatul Ulama dalam dinamika hubungan politik serta wacana politik yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama.

Bab III membahas tentang dinamika hubungan politik antara NU dan Pemerintah Indonesia pada masa Reformasi dan Pemilihan Umum (Pemilu) langsung mulai tahun 2004 sampai tahun 2022. Pada bab ini peneliti membagi menjadi beberapa subab yang menjelaskan fase-fase kepemimpinan berdasarkan periode Ketua Umum PBNU dari tahun 2004 sampai 2022.

Bab IV berisi mengenai wacana politik yang dibangun Nahdlatul Ulama dalam hubungannya dengan Pemerintah Indonesia (2004-2022). Pada bab ini peneliti menulis wacana politik kebangsaan NU, teori identitas nasional Francis Fukuyama dan kemudian menguraikan pemikiran politik kebangsaan sebagai implementasi dari setiap ketua umum Nahdlatul Ulama dalam hubungan politiknya dengan Pemerintah Indonesia utamanya pada masa Pemilu langsung yang diselenggarakan dari tahun 2004 sampai 2022.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan mengulas secara ringkas hal-hal yang menonjol dari bab-bab sebelumnya, sebelum akhirnya mengambil simpulan akhir yang bisa dikembangkan pada penelitian-penelitian selanjutnya untuk kajian yang lebih komprehensif.